

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aluh Aluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Kecamatan Aluh Aluh terdiri dari 19 desa, yaitu :

- a. Aluh Aluh Besar
- b. Aluh Aluh Kecil
- c. Aluh Aluh Kecil Muara
- d. Bakambat
- e. Balimau
- f. Bunipah
- g. Handil Baru
- h. Handil Bujur
- i. Kuin Besar
- j. Kuin Kecil
- k. Labat Muara
- l. Pemurus
- m. Podok
- n. Pulantan

- o. Simpang Warga
- p. Simpang Warga Dalam
- q. Sungai Musang
- r. Tanipah
- s. Terapu

Tabel 4.1
JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN ALUH-ALUH

NO	KODE	DESA/KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	2001	KUIN KECIL	394	377	771
2	2002	KUIN BESAR	763	755	1.518
3	2003	HANDIL BARU	221	215	436
4	2004	HANDIL BUJUR	548	506	1.054
5	2005	TERAPU	211	220	431
6	2006	PODOK	1.425	1.350	2.775
7	2007	ALUH ALUH KECIL MUARA	584	547	1.131
8	2008	ALUH ALUH KECIL	766	760	1.526
9	2009	BALIMAU	312	294	606
10	2010	BUNIPAH	985	924	1.909
11	2011	SIMPANG WARGA DALAM	747	781	1.528
12	2012	SIMPANG WARGA	1.165	1.100	2.265
13	2013	ALUH ALUH BESAR	1.848	1.660	3.508
14	2014	PEMURUS	1.478	1.411	2.889
15	2015	PULANTAN	543	540	1.083
16	2016	TANIPAH	979	946	1.925
17	2017	LABAT MUARA	585	641	1.226
18	2018	BAKAMBAT	707	695	1.402
19	2019	SUNGAI MUSANG	860	809	1.669
JUMLAH			15.121	14.531	29.652

Sumber: <http://disdukpencaipilbanjardatin.blogspot.co.id/2015/06/jumlah-penduduk-kecamatan-aluh-aluh.html>

2. Identitas Informan

a. Informan I

Nama : Safriyanti
Alamat : Aluh-aluh
Pekerjaan : Ketua PNPM

b. Informan II

Nama : Fatimah
TTL : Tanipah, 16-07-1975
Alamat : Desa Tanipah
Pekerjaan : Peternak
Jabatan : Ketua Kelompok SPP

c. Informan III

Nama : Salasiah
TTL : Bunipah, 28-04-1975
Alamat : Desa Bunipah
Pekerjaan : Penjahit
Jabatan : Ketua Kelompok SPP

d. Informan IV

Nama : Mariana
TTL : Labat Muara, 30-01-1980
Alamat : Desa Labat Muara
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Ketua Kelompok SPP

e. Informan V

Nama : Rasyidah
TTL : Bekambat, 10-05-1979
Alamat : Desa Bekambat
Pekerjaan : Peternak
Jabatan : Ketua Kelompok SPP

f. Informan VI

Nama : Hj. Rohani
TTL : Aluh-aluh, 03-08-1983
Alamat : Aluh-aluh
Pekerjaan : Peternak
Jabatan : Ketua Kelompok SPP

g. Informan VII

Nama : Tatauwiyah
TTL : Tanipah, 5-12-1983
Alamat : Tanipah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : Anggota Kelompok

h. Informan VIII

Nama : Hj. Aspiati
TTL : Banjarmasin, 11-01-1985
Alamat : Tanipah
Pekerjaan : Guru

Jabatan : Anggota Kelompok

i. Informan IX

Nama : Baniah

TTL : Tanipah, 09-05-1980

Alamat : Tanipah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : Anggota Kelompok

j. Informan X

Nama : Madaniah

TTL : Banjarmasin, 11-11-1984

Alamat : Tanipah

Pekerjaan : Pedagang

3. Penyaluran Dana Modal Kerja Program PNPM Mandiri Perdesaan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar

PNPM Mandiri Perdesaan hadir di Kecamatan Aluh-Aluh sejak Juli 2007. Keberadaan PNMP Mandiri Perdesaan di Kecamatan Aluh-Aluh adalah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan seperti kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sasaran dari Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM), sarana prasarana yang belum tersedia, rehabilitasi sarana prasarana yang sudah ada untuk menunjang perekonomian masyarakat desa.

Saat ini, Fasilitas atau program yang tersedia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh dengan Keberdaan PNPM Mandiri Perdesaan yang hanya sampai 31 Desember 2014 adalah hanya keberadaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian dana bergulir kepada kelompok perempuan dalam mengembangkan usaha mikro yaitu dengan memberikan akses permodalan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah secara luas, mudah dan murah.¹

Munculnya SPP sebagai salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu SPP sebagai bentuk partisipasi dari kaum perempuan dan mengelola simpan pinjam di kelompok. Sebelum adanya SPP, ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang beranggotakan kaum laki-laki dan perempuan dengan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam kegiatan UEP, proses peminjaman bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi dalam pengelolaannya kaum laki-laki tidak bisa mengelola pinjaman dengan baik, sehingga dalam proses pengembalian pinjaman mengalami kesulitan. Sehingga sekarang ini UEP digantikan dengan SPP, karena simpan pinjam untuk perempuan kebanyakan para perempuan mempunyai dasar untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga dan juga perempuan lebih teliti dan lebih tertata dalam pengelolaan keuangan.²

¹Safriyanti, Ketua PNPM, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Aluh-aluh, Tahun 2016.

²*Ibid.*

Cara Penyaluran dana SPP di Aluh-Aluh, dana dicairkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan yang mengkoordinir dan mengelola uang SPP, kemudian disalurkan kesetiap kelompok di Desa-desa yang ada di kecamatan Aluh-aluh. Sebelum penyaluran terlebih dahulu para pengelola UPK SPP mendata kelompok-kelompok yang ingin mengambil pinjaman baik itu yang peminjam baru (anggota baru) ataupun peminjam lama (anggota lama) yang akan mengajukan pinjaman setelah semuanya sudah didata dan sudah dipastikan jumlah pinjaman dana perkelompok dan perorangannya, maka dilakukan rapat verifikasi oleh tim UPK spp di setiap kelompok untuk lebih memastikan jumlah pinjaman beserta barang jaminan yang harus melebihi jumlah pinjaman

Besaran nilai modal kerja yang disalurkan melalui Program SPP antara Rp. 1.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00. Sumber dana yang disalurkan sebagai modal kerja dalam Program SPP berasal dari APBD dan dari dana angsuran kelompok. Jangka waktu dalam pengembalian pinjaman dana modal kerja tersebut yakni jangka waktu pengembalian selama 12 bulan. Sistem pengembaliannya adalah anggota menyerahkan angsuran ke ketua kelompok setiap bulan sesuai dengan tanggal penyaluran. Ketua kelompok menyerahkan angsuran ke UPK di Kecamatan sesuai dengan tanggal penyaluran.³

Misalkan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,00, jaminan berupa sepeda motor seharga Rp. 7.000.000,00. Setelah diverifikasi oleh UPK jumlah pinjaman tersebut diserahkan ke badan SPP di kabupaten untuk dicairkan. Setiap kelompok memiliki proposal memiliki proposal memiliki proposal pengajuan pinjaman.

³*Ibid.*

Pada saat pencairan uang diserahkan melalui ketua kelompok kemudian langsung kepada anggota. Setiap acara pencairan dana dilakukan dokumentasi berkelompok dan anggota. Dalam setiap kelompok juga dikenakan biaya administrasi dan tabungan wajib perbulan bagi setiap kelompok. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah pinjaman, misalnya pinjaman Rp. 5.000.000,00, maka pembayaran cicilan perbulan sebanyak Rp. 500.000,00 dan seterusnya.

Pembayaran cicilan selama 12 bulan (satu tahun) apabila ada tunggakan dalam kelompok maka tim UPK SPP kecamatan akan langsung menangani tunggakan dengan mengambil jaminan yang ada dalam perjanjian yang sudah disepakati pengajuan dalam rapat verifikasi dan untuk kelompok yang tidak pernah menunggak dan pembayarannya tepat waktu pada tanggal yang telah ditentukan maka akan mendapat sembako dari UPK SPP pertahun.⁴

Berbagai Pernyataan dari beberapa pihak yang menerima penyaluran dana melalui Program SPP adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Fatimah
- TTL : Tanipah, 16-07-1975
- Alamat : Desa Tanipah
- Pekerjaan : Peternak
- Jabatan : Ketua Kelompok SPP

Ibu Fatimah adalah warga Desa Tanipah yang bekerja sebagai peternak. Awalnya usahanya mengalami kemunduran dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya lagi. Ketika ada program SPP, maka ikut dalam

⁴*Ibid.*

program tersebut dan diamanahkan menjadi ketua kelompok. Melalui program SPP diakui oleh ibu Fatimah bahwa keberadaan Program SPP sangat membantu dalam mengembangkan usaha beliau yang sebelumnya mengalami kemunduran yang signifikan. Dengan bantuan modal SPP, usaha ternak beliau bisa kembali stabil dan lebih berkembang dari sebelumnya.

- b. Nama : Salasiah
- TTL : Bunipah, 28-04-1975
- Alamat : Desa Bunipah
- Pekerjaan : Penjahit
- Jabatan : Ketua Kelompok SPP

Ibu Salasiah adalah warga Desa Bunipah yang bekerja sebagai penjahit. Sebagai seorang perempuan yang ikut bekerja membantu perekonomian keluarga dengan suami yang hanya bekerja serabutan, maka penting bagi ibu Salasiah untuk dapat berpenghasilan agar tercukupinya kondisi keluarganya. Maka Ibu Salasiah mengajukan pinjaman modal kerja dalam Program SPP dan mendapatkan pinjaman untuk membeli mesin jahit. Mesin jahit yang sebelumnya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak efektif lagi. Kemudian saat mendapatkan pinjaman dibelikanlah mesin jahit baru, sehingga lebih produktif dalam menghasilkan, mesin jahit yang awalnya Cuma satu dengan berjalannya waktu dan usaha yang produktif, sekarang mesin jahit ibu Salasiah sudah ada tiga buah dengan bantuan dari tetangga lain.

- c. Nama : Mariana

TTL : Labat Muara, 30-01-1980

Alamat : Desa Labat Muara

Pekerjaan : Pedagang

Jabatan : Ketua Kelompok SPP

Ibu Mariana adalah seorang pedagang yang merupakan warga Desa Labat Muara. Setelah ditinggal suaminya, beliau diharuskan untuk menghidupi dan mencukupi untuk beliau dan satu anaknya. Awalnya beliau sempat frustrasi dengan keadaan bingung dalam mencari pekerjaan. Kemudian mengetahui adanya program SPP, beliau kemudian mengajukan pinjaman modal kerja dan dapat berdagang. Akhirnya berjalan beberapa tahun, sampai saat ini beliau masih berdagang dan dapat mencukupi kebutuhan beliau dan satu anaknya.

d. Nama : Rasyidah

TTL : Bekambat, 10-05-1979

Alamat : Desa Bekambat

Pekerjaan : Peternak

Jabatan : Ketua Kelompok SPP

Ibu Rasyidah samahalnya dengan Ibu Fatimah bekerja sebagai peternak. Beliau adalah warga Desa Bekambat. Di Desanya beliau membantu suami dengan ikut bekerja sebagai peternak. Dengan pengelolaan keuangan yang baik melalui bantuan dana dalam program SPP, pada akhirnya dengan bergantung pada pekerjaan sebagai peternak, beliau dapat menghasilkan dana dalam membantu ekonomi beliau dan suaminya.

e. Nama : Hj. Rohani

TTL : Aluh-aluh, 03-0801983

Alamat : Aluh-aluh

Pekerjaan : Peternak

Jabatan : Ketua Kelompok SPP

Ibu Hj. Rohani berprofesi sebagai peternak dan tinggal di Aluh-aluh Besar. Pada awalnya beliau peternakan beliau sempat mengalami kebangkrutan dan kemunduran yang signifikan. Disaat beliau kekurangan modal, beliau mengajukan bantuan dana melalui program SPP. Dengan pengajuan tersebut, beliau mendapatkan modal kerja baru, dan meniti peternakan dari kecil lagi, namun dengan kerja keras akhirnya usaha beliau semakin menanjak dan meningkat. Bantuan dana melalui SPP dirasakan beliau sangat berperan dalam perkembangan usaha beliau hingga saat ini.

f. Nama : Tatauwiyah

TTL : Tanipah, 5-12-1983

Alamat : Tanipah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jabatan : Anggota Kelompok

Berdasarkan pengakuan dari Ibu Tatauwiyah, beliau bukanlah seorang pedagang ataupun peternak. Beliau hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah. Pinjaman yang didapatkan melalui program SPP disebutkan oleh beliau bahwa dana itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengalami kekurangan.

- g. Nama : Hj. Aspiati
TTL : Banjarmasin, 11-01-1985
Alamat : Tanipah
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Anggota Kelompok

Ibu Hj. Aspiati adalah seorang Guru SD. Menjadi anggota program SPP telah lama. Dari segi kehidupan ekonomi, beliau tidak lah kekurangan melainkan serba berkecukupan. Dana yang didapatkan dari pinajamn, ternyata dipergunakan untuk membeli barang-barang rumah tangga disaat gaji sebagai guru masih belum diterima.

- h. Nama : Baniah
TTL : Tanipah, 09-05-1980
Alamat : Tanipah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jabatan : Anggota Kelompok

Melalui penjelasan dari Ibu Baniah tentang pinjaman dari program SPP, maka diketahui bahwasanya keadaan beliau dilihat dari segi perekonomian tidak cukup atau perlu dibantu, akan tetapi bantuan yang didapatkan melalui pinjaman tidaklah digunakan untuk keperluan usaha produktif, tetapi semata dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan dan sekolah anak.

- i. Nama : Madaniah

TTL : Banjarmasin, 11-11-1984

Alamat : Tanipah

Pekerjaan : Pedagang

Jabatan : Anggota Kelompok

Ibu Madaniah adalah seorang penjual kue. Sebelum berjualan kue, beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga, setelah menjadi anggota program SPP dan mendapatkan bantuan pinjaman dana, kemudian dana tersebut dipakai untuk memulai usaha berjualan kue dengan memanfaatkan keterampilan yang beliau punya. Sebenarnya telah lama ingin berjualan, hanya saja tidak memiliki modal. Akhirnya perbedaan pinjaman program SPP dirasa telah sangat membantu dalam beliau memulai usaha.

B. Analisis Data

1. Penyaluran Dana Modal Kerja Program PNPB Mandiri Perdesaan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar

Masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh kebanyakan bekerja sebagai wirausahawan yang dalam kesehariannya dapat mengalami kemajuan maupun kemunduran dalam usahanya melihat pada kondisi perekonomian yang ada. Dengan kehadiran SPP di Kecamatan Aluh-aluh, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi untuk memupuk modal sangat penting mengingat bahwa kegiatan simpan pinjam

ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat

Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang dengan mudah untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Adanya kegiatan simpan pinjam bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi keterpurukan ekonomi yang menimbulkan keresahan di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa terjadinya kemiskinan.

Melalui SPP PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian dana bergulir yang melibatkan masyarakat yaitu dari kaum perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantau dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian perempuan, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak yaitu pemerintah sebagai penyedia dana dan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran.

Penyaluran dana dapat dibagi menjadi dua macam dari segi sifatnya yakni produktif dan konsumtif.⁵ Ditinjau dari segi sifat pembiayaan, maka program pemerintah berbentuk Simpan Pinjam Perempuan yang ditujukan untuk kaum perempuan ini adalah berbentuk Pembiayaan Produktif, karena penyaluran dananya ditujukan dan dimanfaatkan untuk keperluan usaha.

Berdasarkan beberapa wawancara yang peneliti lakukan dengan lima orang penerima program SPP yang juga merupakan ketua kelompok SPP, dapat diketahui bahwa sebelum adanya pinjaman dana SPP, usaha masyarakat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Setelah adanya SPP, seharusnya masyarakat

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)hlm.160-168.

sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan usaha yang mereka jalani. Diharapkan pula agar kegiatan simpan pinjam seperti ini tetap berlanjut sehingga dapat membantu dan menyadarkan bagi masyarakat miskin lainnya. Peminjaman dana SPP sebagai salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang produktif.

Pada praktiknya, memang program SPP telah banyak membantu masyarakat, tetapi seharusnya tidak sebatas dalam membantu pemenuhan kebutuhan saja, melainkan pemenuhan kebutuhan tersebut didahului dengan pengembangan usaha produktif dengan permodalan dari dana SPP. Pada fakta dilapangan ternyata terdapat beberapa penyaluran dana ini tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas tentang kemiskinan dari segi definitif, maka penyaluran dana melalui program SPP dalam konsep pemberdayaan tidak

⁶Adhi, adhiprawiraa.blogspot.com/2014/05/pengertian-kemiskinan.html, diakses tgl 26-07-2016

cukup baik. Dikarenakan masyarakat yang diberikan bantuan pinjaman dana tidak semua adalah masyarakat miskin yang memang memerlukan bantuan. Tetapi terdapat pula orang-orang yang sebenarnya berkecukupan atau mampu, sehingga dana ini telah salah diarahkan atau tidak tepat sasaran.

Pembangunan mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah itu. Pendapatan masyarakat harus dapat ditingkatkan sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dapat terlaksana. Pendapatan masyarakat yang perlu ditingkatkan di sini adalah masyarakat yang termasuk miskin. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup yang paling pokok adalah yang berada di bawah garis kemiskinan mutlak.⁷

Program SPP memang diarahkan untuk tujuan pembangunan ekonomi, kenyataan dalam praktik yang ada dapat dikatakan tidak berjalan 100% tepat dalam rangka pembangunan ekonomi. Hal tersebut telah tersurat dalam pernyataan para penerima pinjaman tidak semuanya dilaksanakan sesuai aturan berlaku bahwa dana SPP ditujukan untuk pengembangan usaha. Apa yang terjadi adalah tidak terlaksananya pengembangan usaha yang signifikan dimasyarakat, karena, dana dari pinjaman ini masih ada yang disalahgunakan dan juga tidak tepat sasaran.

kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai serta dapat

⁷Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hlm. 41.

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁸

Dalam konsep kesejahteraanpun, Program SPP ini tidak signifikan berperan aktif dalam mewujudkannya. Karena saat masyarakat yang seharusnya menjadi pihak yang produktif, ternyata malah menjadi pihak yang konsumtif semata. Maka kondisi tersebut, menggambarkan adanya kesenjangan antara tujuan awal program, dengan realisasi program di masyarakat.

Program SPP merupakan program pemerintah berbentuk penyaluran dana atau pembiayaan. Secara teoritis maka tujuan pembiayaan secara makro adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dan dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksi.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

⁸Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 25.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Dari kelima tujuan di atas, maka keberadaan Program SPP di Kecamatan Aluh-aluh dapat dikatakan tidak benar-benar memenuhi kelima tujuan tersebut, yang mana secara umumnya kelima tujuan tersebut telah tergabung dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pembangunan yang produktif pada konsep kesejahteraan

Program SPP yang merupakan transaksi pemberian pinjaman dalam sudut pandang syariah disebut dengan *qardh*. Akad *qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.⁹ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya program SPP belum mampu membantu masyarakat sepenuhnya di Kecamatan Aluh-aluh, sehingga mereka dapat berkembang dan maju dalam usaha masing-masing yang menghasilkan terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, dimana masing-masing individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya manusia yang mengimpikan tercapainya suatu

⁹ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm.100

kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan diri, baik keluarga maupun kelompok. Untuk mencapai semua itu, maka ada bermacam-macam cara dan aktifitas yang manusia lakukan seperti halnya saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah diajarkan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dari ayat tersebut dapat dibuktikan bahwa keutamaan memberikan kredit atau pinjaman adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dalam islam kepada setiap umat muslim yang memerlukannya, sedangkan dasar dari kredit adalah kepercayaan. Karena (kreditur) pihak yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, oleh karena itu bagi debitur, apabila telah di ikat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, maka wajib janji itu ditepati untuk membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian itu.

Pada praktik dalam operasional SPP, terdapat unsur bunga dalam pinjaman tersebut. Padahal dasar dari pinjaman uang adalah sikap tolong menolong. Apalagi di dalam Islam dilarang adanya penambahan dalam pinjaman uang kerana tambahan tersebut digolongkan pendapatan yang bathil yang disebut

sebagai riba dan bunga biarpun itu kecil tetaplah riba serta hukumnya haram. Dengan demikian pinjaman SPP ini tidaklah sesuai dengan syariat Islam

2. Kesesuaian Pelaksanaan Program SPP dengan Aturan Berlaku

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir SPP, maka disebutkan tujuan pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
- b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana PNPM yang sesuai dengan tujuan program
- c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan
- d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, transparan dan berkelanjutan
- e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Selanjutnya pada disebutkan bahwa fungsi dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pinjaman dana kepada masyarakat kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha produktif

- b. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif dan kelompok perempuan
- c. Mendayagunakan kemampuan potensi lokal dalam pengembangan usaha bagi ekonomi masyarakat miskin
- d. Mempertinggi kualitas sumber daya manusia dan kelompok untuk mencapai terciptanya masyarakat yang mandiri
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan

Praktik yang ada tentang program SPP yang didapatkan penulis dalam penelitian ini dihubungkan dengan tujuan dan fungsi mendasar keberadaan dana bergulir pada ketentuan yang tertera di SOP yang ada, maka realisasi dilapangan tidaklah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan telah disebutkan bahwa secara garis besar bahwa arti keberadaan dana bergulir ini adalah pada tujuan pengembangan usaha atau keperluan produktif dan sasarannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dana dari SPP diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya mampu dan tidak memerlukan bantuan
- b. Dana dari SPP memang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun tidak digunakan untuk keperluan usaha, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga seperti biaya makan, sekolah, dan pembelian barang-barang pribadi.

Dengan demikian telah terjadi kesenjangan antara ketentuan mendasar yang terdapat dalam SOP dengan realisasi yang ada. Kesenjangan tersebut secara garis besar yakni:

- a. Dana bergulir disalahgunakan
- b. Dana bergulir tidak tepat sasaran.